



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Di dalam pasal 18 Undang-undang Dasar tahun 1945 telah diterangkan bahwa pembagian daerah di Indonesia berdasarkan atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan pemerintahannya ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kebijakan otonomi daerah yang diharapkan adalah sebuah kebijakan otonomi yang mandiri dengan harapan dapat mawadahi dan memberikan respon secara aktif terhadap kebutuhan, kehendak dan aspirasi masyarakat. Pengembangan dan pembangunan Otonomi Daerah tetap dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang khususnya yang ada di daerah maupun di tingkat nasional.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 15 Oktober Tahun 2004, telah memberi wewenang sebesar-besarnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban kepada daerah untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola dan mengatur sendiri daerahnya dalam system penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1. Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyangkut tentang Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang menerangkan tentang wewenang BPD mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dari Peraturan Pemerintah tersebut sangat jelas bahwa, pengawasan yang dilakukan BPD terhadap Pemerintah Desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sangat memberikan harapan yang besar bagi masyarakat terhadap sebuah implementasi Otonomi Daerah. Hal ini menjadi motivasi dan memberi dinamika serta suasana baru dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Sebab, masyarakat menyadari bahwa keberadaan institusi-institusi demokrasi Desa selama ini berada dalam kondisi yang tidak kondusif dalam kemajuan Pemerintah Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat fenomena yang sedemikian rupa, maka sangat diperlukan sebuah badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam sebuah proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional. Sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat serta mengatur rumah tangganya sendiri.

Badan Pengawasan tersebut adalah sebuah konsekuensi implemementasi Otonomi Daerah sebagai fundamental pergeseran struktur politik Pemerintah Desa. Eksistensi lembaga ini memiliki fungsi tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan pihak eksekutif Desa. Mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, aturan ini juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan misi luhur yang berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai lembaga legislative tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implemementasi peraturan ini sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat di tingkat desa memiliki basis legitimasi yang cukup kuat dikarenakan ia dipilih dan oleh penduduk desa yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh Karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga control Kepala Desa dengan menjalankan fungsi Checks and Balance dalam Pemerintahan Desa. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan wilayah administratif bahkan tidak lagi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup dilingkungan masyarakat

Adapun keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuansing, dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi social politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan melalui panitia pemilihan.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tersebut pada pasal 58 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah :

- a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memegang jabatannya bersumpah/ berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Susunan kata sumpah/ janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Selain itu, anggota Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 57 yang dapat dipilih menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintahan Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Adapun mekanisme pencalonan dan penetapan anggota BPD sebagaimana tercantum dalam pasal 59:

- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- c. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda

Oleh karena itu, ada beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian kita dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, lahirnya BPD hendaknya memberikan harapan baru bagi demokrasi Desa. BPD diharapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi arena baru demokrasi Desa, antara lain menjadi tempat pembuatan peraturan Desa yang berbasis pada artikulasi kepentingan masyarakat serta mampu melakukan kontrol pengawasan terhadap sepak terjang Pemerintah Desa. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat Desa kian kompleks dan memerlukan perhatian sungguh-sungguh dari berbagai pihak. *Kedua*, perlu dilakukan *Capacity Building* pengembangan kemampuan BPD sebagai institusi public ditingkat Desa. *Ketiga*, mengenai sistem pemilihan rekrutmen dan pengisian anggota BPD hendaknya memperhatikan aspek yang tinggi aspiratif dan memepertimbangkan kualitas figure sesuai dengan persyaratan tambahan yang memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Desa. *Keempat*, pembentukan BPD hendaknya menjadi asset pengembangan demokrasi dimasyarakat Desa dari pada sebuah konflik yang mendatangkan prahara yang tak kunjung reda. (Khairul Anwar, 2003 : 5-6)

Desa Sumber Jaya adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perannya sangat di tuntutan oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 : Tingkat Kehadiran Anggota BPD dalam Kegiatan Rapat di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jumlah Anggota	Tanggal Rapat	Jumlah Yang Hadir	Jumlah Yang Tidak Hadir
1	9	03-07-2014	3	6
2	9	26-11-2014	4	5
3	9	08-02-2015	3	6
4	9	20-05-2015	5	4
5	9	22-07-2015	4	5
6	9	19-11-2015	3	6

Sumber : Kantor BPD Tahun 2018

Dari Tabel diatas dilihat bahwa enam (6) kali kegiatan rapat terakhir ini jumlah yang hadir lebih kecil daripada jumlah yang tidak hadir. Hal ini salah satunya yang menyebabkan kurangnya komunikasi antar anggota. Adapun anggota dari BPD yakni : Ketua Nursidik S.pd, Wakil : Ramijo, Sekretaris : Sobirin dan anggota : Maya Anggraini Dewi, Iswandiyah, Rosun, Teguh Tri Waluyo, Agus Supriyanto dan Anifudin.

Dari keterangan tabel diatas juga yang didapatkan bahwa keadaan fungsi BPD yang terjadi di Desa Sumber Jaya sebagai lembaga legislative di desa belum berjalan dengan maksimal, misalnya kurang berfungsinya BPD dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat, karena belum dilakukannya penjangkaran aspirasi langsung kepada masyarakat, kurangnya wawasan anggota BPD dalam mengawasi kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Peraturan Desa yang menjadi patokan hanya satu Peraturan Desa yaitu Peraturan Desa tahun 2006 tentang Kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa dan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan program pembangunan yang telah direncanakan oleh Kepala Desa dan BPD. Dengan memperhatikan keberadaan BPD sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat pada undang-undang nomor 32 tahun 2004 di kaitkan dengan pelaksanaan tugas sehari-hari, maka belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas maupun kinerja yang telah terlaksana BPD Desa Sumber Jaya sejak 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan Pengawasan di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2016

No	Hari Tgl/Bln/Thn	Jenis Kerja	Uraian Kerja
1	Senin, 04 Januari 2016	Rapat dengan paguyuban Lembaga Desa : LPMD,RT,RW	Koordinasi antar lembaga desa dalam rangka mendukung pembangunan desa sesuai dengan tugas masing masing lembaga.
2	Rabu, 20 Januari 2016	MUSRENBANGDES Th. 2016	MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk pembangunan di tahun TH 2017 , Dimana setiap Ketua RT mengusulkan pembangunan diwilayahnya masing masing.
3	Senin, 08 Februari 2016	Rapat dengan paguyuban Lembaga Desa : LPMD,RT,RW	Koordinasi dengan kelembagaan desa agar pemerintah desa bisa ikut aktif dalam acara bulanan yang diadakan oleh pengurus Paguyuban Lembaga Desa Sumber Jaya.
4	Selasa, 14 Maret 2016	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa, bidan desa, KPMD, dan Tokoh masyarakat	Musyawarah Penyusunan RKPDes Tahun 2018 1. Sertifikat tanah massal 2. Regenerasi Linmas 3. Penghijauan sepanjang jalan Desa 4. Pengecoran jalan Rt. 01



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

			5. Pembangunan gedung serba guna di lapangan depan balai desa 6. Penerangan jalan sepanjang jalan desa 7. Posyandu lansia di dusun rejosari 8. Alokasi dana untuk kegiatan keagamaan 9. Pembentukan Tim kebersihan Tingkat Desa
5	Rabu, 13 April 2016	Rapat Dengan Pemerintah Desa	Musyawarah APBDES Desa Sumber Jaya 2017
6	Rabu, 11 Mei 2016	Rapat Bulanan BPD	– Koordinasi BPD dalam rangka mengawal Pelaksanaan pembangunan Dana Desa Tahap I
7	Senin, 16 Mei 2016	Rapat di Kantor KEMENAG Kaje	Sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa
8	Senin, 04 Juli 2016	Rapat Bulanan BPD	Pembagian tugas dalam rangka mengawal pembangunan yang bersumber dari Dana Desa tahap I
9	Selasa, 09 Agustus 2016	Legenonan dan Khitanan Massal	– Ikut berpartisipasi menjadi panitia pelaksana kegiatan legenonan dan khitanan massal. – Legenonan di isi dengan kegiatan pembacaan QS. Yasin dan Tahlil di kantor Balaidesa. – Khitanan Massal diikuti oleh 15 peserta..
10	Rabu, 14 September 2016	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	Penyampaian Laporan pertanggung jawaban Kegiatan Legenonan dan Khitanan Massal
11	Senin, 17 Oktober 2016	Rapat di aula Kemenag Kab. Kuantan Singingi	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang : 1. BPD 2. Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa 3. Perubahan atas perda No. 8 Th 2015 Ttg, Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12	Selasa, 25 Oktober 2016	Rapat di aula Kecamatan Singingi Hilir	Rapat Koordinasi pembentukan PPS dan sekretariat PPS
13	Rabu, 09 November 2016	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	<ul style="list-style-type: none"> – Pencairan ADD TAHAP I yang digunakan untuk operasional dan tunjangan Pemdes dan lembaga Desa. – Bantuan rehap rumah tidak layak huni 20 Jt untuk dua warga
14	Selasa, 15 November 2016	Rapat Pencairan Dana Desa Tahap II	<p>Pencairan Dana Desa tahap I yang digunakan</p> <p>Untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> · Buis 30 cm saluran limbah rumah tangga 115 M di rt.13 · Pemb. Rabat beton di jln lapangan rt 10-13 124.7 m³ · Pemb. Jembatan di RT. 02 (4×5)M · Bulan bakti gotong royong di 19 Rt · Operasional pembentukan BUMDES
15	Kamis, 15 Desember 2016	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	<p>Musyawarah Rencana Pembentukan BUMDES</p> <p>Dengan hasil usulan rencana untuk membuat jenis usaha sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gedung serba guna 2. Sewa ruko 3. Jasa pembayaran listrik 4. Sewa alat prasmanan 5. Apotek Desa 6. Jasa Bengkel Motor 7. Pengelolaan air bersih 8. Pengelolaan Sampah
16	Senin, 19 Desember 2016	Rapat pembahasan APBDes Perubahan	Bantuan Gubernur sebesar 30 Jt yang semula di alokasikan untuk bantuan WC/Jamban 20 Unit melalui APBDes perubahan digunakan untuk bantuan RTLH sebanyak 3 unit
17	Kamis, 29 Desember 2016	Rapat Bulanan BPD	Penyusunan Laporan Kinerja BPD Tahun 2016.

Sumber : Data Olahan BPD tahun 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPD pada desa Sumber Jaya kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terbilang dari bulan Januari hingga Desember 2016 sebanyak 17 kegiatan, dimana setiap bulannya BPD merencanakan kegiatan rapat bulanan, tetapi pada bulan juni BPD tidak mengadakan rapat atau pengawasan apapun. Pada tahun 2016 tidak adanya kegiatan seperti memanggil, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yang mana tugas ini merupakan tupoksi dari BPD itu sendiri.

Tabel 1.3 Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam kegiatan Pengawasan di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017

No	Hari Tgl/Bln/Th	Jenis Kerja	Uraian Kerja
1	Jumat, 13 Jan 2017	Rapat Dengan Pemerintah Desa dan LPMD	Pembahasan rancangan APBDes tahun 2017, dengan menentukan prioritas pembangunan fisik yang akan didanai dari Pusat dan Daerah dengan skala prioritas pembangunan, Jalan baru, Pengaspalan Jalan.
2	Selasa, 17 Jan 2017	Rapat Bulanan BPD	Meningkatkan Koordinasi ,Komunikasi dan kerjasama yang terpadu antar Lembaga Desa dalam mengawal jalannya pemerintahan Desa dengan jalan mendukung sepenuhnya kegiatan bulanan yang diadakan oleh paguyuban Lembaga Desa Sumber Jaya
3	Rabu, 15 Feb 2017	Rapat Bulanan BPD	Koordinasi antar anggota BPD dalam rangka mengawal jalannya pembangunan DD tahap II tahun 2016 (silpa)
4	Sabtu, 25 Feb 2017	Rapat dengan lembaga desa : LPMD, RT, RW	Koordinasi dengan kelembagaan desa agar pemerintah desa bisa ikut aktif dalam acara bulanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Rabu, 15 Maret 2017	Rapat Bulanan BPD	<ul style="list-style-type: none"> – Mendorong Pemerintah desa untuk mengadakan sertifikasi tanah secara massal, – Mengusulkan ke Pemerintah Desa untuk segera mengangkat ketua RT baru di RT 18 dusun sumber sari
6	Senin, 17 April 2017	Rapat Bulanan BPD	Menyusun rencana pembangunan jembatan jalur tani di dusun rejosari RT. 17 RW.05 untuk di ajukan ke Pemerintah Desa.
7	Rabu, 03 Mei 2017	Rapat Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa	<ul style="list-style-type: none"> – Pengesahan dan penetapan APDES 2017 yang dituangkan dalam Peraturan Desa Sumber Jaya No. 03 Tahun 2017. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. – Penyusunan Tim Pengelola Kegiatan untuk melaksanakan Pembangunan DD tahap I.
8	Selasa, 16 Mei 2017	Pencairan ADD tahap 1	Pencairan ADD tahap I yang digunakan untuk operasional dan tunjangan Pemdes dan Lembaga Desa.
9	Rabu, 07 Juni 2017	Rapat Pencairan Dana Desa Tahap I	Dana Desa tahap I digunakan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemb. Rabat beton Rt.04-05 168 m³ 2. Pemb. Senderan bahu jalan Balai desa ke barat 150 M 3. Pembangunan Rabat beton jalan depan puskesmas 105 m³ 4. Pembangunan saluran limbah rumah tangga buis 30 Cm di dusun rejosari 223 M
10	Selasa, 04 Juli 2017	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	– Penyusunan rencana kegiatan tahunan Desa, Legenonan dan Khitanan Massal.
11	Jumat, 18 Agustus 2017	Legenonan dan Khitan Massal	<ul style="list-style-type: none"> – Ikut berpartisipasi menjadi panitia pelaksana kegiatan legenonan dan khitanan massal. – Legenonan di isi dengan kegiatan pembacaan QS. Yasin dan Tahlil di kantor Balaidesa. – Khitanan Massal diikuti oleh 11 peserta.
12	Rabu, 06	Rapat dengan	Penyampaian Laporan pertanggung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	September 2017	Pemdes dan Lembaga Desa	jawaban Kegiatan Legenonan dan Khitanan Massal
13	Rabu, 04 Oktober 2017	Rapat Bulanan BPD	Penyusunan konsep Perdes pengangkatan dan pemberhentian lembaga Desa (LPMD,RT,RW,Karang taruna)
14	Senin, 09 Oktober 2017	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	Penyampain Laporan keuangan Karang taruna Mitra warga dari tahun 2005 sampai 2017, dengan saldo kas Pertanggal 09 Oktober 2017 sebesar Rp. 3.924.547,-
15	Jumat, 08 November 2017	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	Lelang Bengkok Kaur Kesra dan Bengkok Kadus Sumber Jaya selama 1 Tahun,
16	Selasa, 21 November 2017	Rapat Bulanan BPD	– Peninjauan lokasi penerima manfaat bantuan RTLH di kebonagung dan plosoran. – Persiapan penyusunan Laporan Kinerja BPD tahun 2017
17	Sabtu, 02 Desember 20107	Rapat dengan Pemdes dan Lembaga Desa	Pemilihan pengurus Karang taruna Mitra Warga periode 2018- 2021 dengan ketua terpilih.
18	Selasa, 05 Desember 2017	Rapat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kuantan Singingi	Rapat kerja bersama komite I DPRD RI dalam pengawasan atas pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Sumber : Data Olahan BPD tahun 2017

Mencermati uraian diatas, yang kelihatan ialah belum berjalannya fungsi BPD secara menyeluruh, karena pada tahun 2017 ini kurang lebih kegiatan yang dilakukan sama dengan kegiatan pengawasan pada tahun 2016, tidak ada perkembangan yang lebih untuk pembangunan Desa Sumber Jaya. Oleh karenanya sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk itu penelitian ini mengambil judul “***Analisis Peranan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi***”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok penelitian yaitu :*“Bagaimana Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”*.

1.3 Tujuan

Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimana peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan informasi dan masukan bagi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perannya sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sumber Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya daam meneliti permasalahan yang sama

- c. Untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melihat dan memahami apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan dalam enam bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan tentang teori – teori yang dijadikan dasar penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi penelitian yang meliputi sejarah, struktur organisasi dan sumber daya organisasi, informasi lain yang relevan dengan judul penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang hasil analisa dan pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang relevan dari hasil penelitian ini

